

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-buku.**

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004.

Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira, 2000.

Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia.*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008.

Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003.

Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional.*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Grafika Indonesia.

Purmadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Prof. Bagir Manan, *Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*.  
Makalah 21 Maret 2001.

Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi*,  
Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Buku Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Jakarta, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Lukman Bratamidjaja, *Aspek Ilmu perundang-undangan BVKS bagian I*, Pintu Gerbang No.44, direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2002.

DR. Andi Hamzah, SH, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*,  
Jakarta : Rajawali Press, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan  
Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*,  
Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.

M. Husni, *Moral dan Keadilan sebagai landasan penegakan hukum yang  
responsif*. Jurnal Equality: 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke-2  
Bandung:Alumni, 1998.

M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan  
Ketahanan Nasional*, UI-Press Jakarta, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Ridwan Halim & Flora Liman Mangestu, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum  
dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta: UKI, 1992.

Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan  
Ketahanan Nasional*, UI-Prss Jakarta, 2004, hal 20.

## **B. Peraturan PerUndang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pencegahan, dan Penangkalan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (perubahan undang-undang lama).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

## **C. INTERNET**

Wikipedia indonesia , "<http://www.wikipediaid.com> , 24 Juli 2012.

<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49> , yang direkam pada 1 Mar 2007

03:28:22 GMT ,penegakan hukum,10 Mei 2012.